



GUBERNUR GORONTALO  
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 42 TAHUN 2014  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENGUATAN MODAL DANA PENGEMBANGAN  
USAHA MELALUI BANTUAN HIBAH KEPADA KOPERASI BERKUALITAS  
DI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan, maka perlu peningkatan dan pemantapan kemampuan kepada koperasi berkualitas di Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran koperasi disektor ekonomi kerakyatan, maka diperlukan dukungan penguatan modal dana pengembangan usaha melalui bantuan hibah kepada koperasi berkualitas di Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Petunjuk Tehnis Program Penguatan Modal Dana Pengembangan Usaha Melalui Bantuan Hibah Kepada Koperasi Berkualitas di Provinsi Gorontalo Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 16);
15. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi, Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 06).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENGUATAN MODAL DANA PENGEMBANGAN USAHA MELALUI BANTUAN HIBAH KEPADA KOPERASI BERKUALITAS DI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Dinas Provinsi adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
5. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntuknya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
6. Program Penguatan Modal Dana Pengembangan Usaha Melalui Bantuan Hibah kepada Koperasi Berkualitas di Provinsi Gorontalo Tahun 2014 adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo c.q Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dalam bentuk pemberian bantuan Dana dengan status bantuan sosial yang bersifat stimulan bagi kegiatan Koperasi dan pelaku usaha mikro dan kecil anggota koperasi untuk mengatasi kapasitas usaha akibat keterbatasan modal
7. Koperasi adalah Badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
8. Rekening Penampungan adalah rekening pada Bank atas nama Koperasi yang dibuka khusus untuk menampung bantuan dana dari Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo c.q Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.
9. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tanggung dan mandiri.

10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
11. Modal usaha adalah dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dalam bentuk Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan Koperasi, usaha Mikro dan kecil di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam bentuk Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan, koperasi, usaha mikro dan kecil di tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Tujuan Program adalah:

- a. memberikan bantuan dana untuk memperkuat permodalan dan penumbuhan usaha koperasi berkualitas serta pelaku usaha mikro dan kecil anggota koperasi.
- b. mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya pelaku usaha skala mikro dan kecil melalui koperasi.
- c. mendukung upaya peningkatan kinerja usaha koperasi yang anggotanya adalah pelaku usaha mikro dan kecil diberbagai sektor usaha produktif.
- d. mendukung upaya penumbuhan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan, bagi pelaku usaha mikro anggota koperasi.

#### Pasal 3

Sasaran Program adalah:

- a. terwujudnya peningkatan peran dan kinerja Koperasi dalam memfasilitasi pengembangan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil anggotanya yang bergerak di berbagai sektor usaha produktif;

- b. tersalurnya bantuan dana sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap Koperasi Berkualitas, sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia;
- c. meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan koperasi kepada anggota dan masyarakat dengan memperhatikan pemerataan sesuai dengan potensi masing masing koperasi.

### BAB III

#### MEKANISME PENYELENGGARAAN PROGRAM

##### Pasal 4

Penyelenggaraan Program dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan dana kepada 15 (lima belas) Koperasi Berkualitas di Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

##### Pasal 5

- (1) Bantuan dana yang diberikan kepada Koperasi digunakan untuk pengembangan modal usaha Koperasi.
- (2) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan bagi pengembangan usaha mikro dan kecil anggota Koperasi.

### BAB IV

#### PERSYARATAN KOPERASI

##### PESERTA PROGRAM

##### Pasal 6

- (1) Persyaratan umum koperasi yang dapat diberikan dana bantuan Hibah adalah sebagai berikut:
  - a. koperasi primer yang telah berbadan hukum, dengan melampirkan foto copy Akta Pendirian dan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Koperasi;
  - b. telah melaksanakan RAT Tahun Buku 2013 dengan melampirkan laporan keuangan dan Perhitungan Hasil Usaha;
  - c. memiliki nomor rekening atas nama koperasi;
  - d. memiliki administrasi organisasi, usaha, dan keuangan yang lengkap;
  - e. memiliki Perangkat Organisasi dan Daftar Anggota;
  - f. memiliki unit usaha yang jelas;
  - g. pengurus Koperasi bertanggungjawab terhadap pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan/Hibah.

- (2) Persyaratan khusus koperasi yang dapat diberikan dana bantuan sosial adalah sebagai berikut :
- a. menandatangani Naskah Hibah antara Pemerintah Provinsi dengan Koperasi peserta program
  - b. menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab dari Koperasi yang diusulkan atas pemanfaatan dana sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB V

### TATA CARA SELEKSI KOPERASI CALON PESERTA PROGRAM

#### Pasal 7

Seleksi terhadap Koperasi Calon Peserta Program dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. koperasi calon peserta program mengajukan permohonan kepada SKPD Kabupaten/Kota, dengan melampirkan permohonan/proposal yang memuat data kelembagaan dan usaha koperasi serta fotocopy akta pendirian dan KTP pengurus.
- b. SKPD Kabupaten/Kota melakukan seleksi dan verifikasi terhadap permohonan/proposal yang diajukan oleh Koperasi Calon Peserta Program;
- c. SKPD Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi berdasarkan hasil seleksi, verifikasi dan evaluasi terhadap kelayakan permohonan/proposal yang diajukan oleh Koperasi Calon Peserta Program berupa Surat Keputusan tentang Penetapan Hasil Seleksi Koperasi Calon Peserta Program
- d. SKPD Kabupaten/Kota meneruskan permohonan program kepada SKPD Provinsi dengan melampirkan Surat Keputusan SKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud huruf c dan seluruh persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- e. SKPD provinsi melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap usulan permohonan Koperasi calon peserta program yang diajukan oleh SKPD Kabupaten/kota.
- f. Berdasarkan huruf e tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan koperasi peserta program melalui Surat Keputusan Gubernur.

BAB VI  
PROSES PENCAIRAN  
DAN PENYALURAN BANTUAN DANA

Pasal 8

Tata cara pencairan bantuan dana diatur sebagai berikut :

- a. koperasi peserta program wajib membuka rekening penampungan bantuan dana atas nama koperasi pada Bank setempat;
- b. rekening sebagaimana dimaksud huruf a dibuka oleh ketua dan bendahara koperasi peserta program;
- c. penyaluran dana ditransfer ke rekening masing masing koperasi peserta program melalui Bank setempat oleh Pemerintah Provinsi c.q Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo, setelah pengurus Koperasi Peserta Program menandatangani Berita Acara Hibah/Bantuan Sosial.

BAB VII  
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 9

- (1) Koperasi peserta program berkewajiban mengadministrasikan pengelolaan bantuan dana program dengan baik sesuai ketentuan administrasi keuangan Negara yang berlaku.
- (2) Koperasi peserta program bertanggung jawab terhadap penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai peruntukannya, termasuk siap menerima sanksi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB VIII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dilaksanakan secara periodik berdasarkan pembagian tugas sebagai berikut :

- a. koperasi peserta program wajib melaporkan realisasi bantuan dana dan perkembangan pelaksanaan penggunaan bantuan dana sesuai peruntukannya kepada SKPD Kabupaten/Kota;
- b. SKPD Kabupaten/Kota melaporkan realisasi program dan perkembangan pelaksanaan program kepada SKPD Provinsi;
- c. SKPD Provinsi melaporkan realisasi program kepada Gubernur Gorontalo.

Pasal 11

- (1) Monitoring terhadap kelangsungan Program dapat dilaksanakan secara berkala.
- (2) Evaluasi setiap 3 (tiga) bulan dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten/Kota kepada Koperasi peserta Program.
- (3) Evaluasi Setiap 6 (enam) bulan dilaksanakan oleh SKPD Provinsi Gorontalo kepada Koperasi peserta Program.

BAB IX  
SUMBER DANA

Pasal 12

- (1) Pembiayaan Program Penguatan Modal Pengembangan Usaha Koperasi Berkualitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo Tahun 2014.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Belanja Bantuan Hibah.
- (3) Perlakuan akuntansi terhadap Program yang diterima koperasi peserta program dibukukan dalam neraca keuangan koperasi peserta program dalam Pos Hibah pada kelompok equitas.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 9 juni 2014  
GUBERNUR GORONTALO,  
TTD  
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 9 Juni 2014  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,  
TTD

WINARNI D. MONOARFA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI



BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 42